SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2018

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan ditujukan untuk **memberikan opini** atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada hari Senin 20 Mei 2019, telah dilaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2018 oleh BPK RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Dori Santosa sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI (Tortama VI), Bapak Ade Iwan Ruswana sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa pejabat struktural dan Fungsional Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Kegiatan ini LHP LKPD TA 2018 diserahkan langsung oleh Bapak Dori Santosa kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak R.Atu Narang dan Bapak Sugianto Sabran sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari tiga laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp4,68 triliun dari anggaran sebesar Rp4,41 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp4,55 triliun dari anggaran sebesar Rp5,69 triliun, total asset sebesar Rp11,54 triliun, ekuitas sebesar Rp11,28 triliun, pendapatan LO sebesar Rp5,29 triliun, dan beban LO sebesar Rp4 triliun, serta surplus sebesar Rp1,29 triliun.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2018. Pencapaian opini WTP ini adalah yang kelima kalinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Telp: (0536) 3241118
Email: palangkaraya@bpk.go.id

yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun demikian, tanpa mengesampingkan keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya:

1. Penetapan besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah belum sesuai realisasi pendapatan sehingga terjadi kekurangan penetapan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp40,36 miliar;
2. Pengelolaan, pencatatan dan pelaporan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya tertib dan memadai;
3. Terjadi kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis dalam beberapa pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa.

BPK mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan pada TA 2018. Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

Masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap diantaranya :

1. Biaya-biaya rehabilitasi atau pemeliharaan atas gedung dan bangunan masih banyak yang belum diatribusikan/dikapitalisasi ke aset induknya, tetapi masih tercatat sebagai item aset tetap tersendiri. Hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi kewajaran penyajian beban penyusutan aset tetap ditahun-tahun mendatang;
2. Menuntaskan pencatatan/penginputan Aset P3D dari kabupaten/kota dalam SIMDA BMD, sehingga semuanya dapat diverifikasi dan dapat diungkapkan, termasuk kelengkapan informasi aset tetapnya dalam SIMDA BMD;
3. SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD masih memunculkan selisih nilai aset tetap yang belum dapat dijelaskan. Saya mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalteng dapat berkoordinasi dengan BPKP untuk menuntaskan masalah ini;
4. Dari sisi pengelolaan, BPK menekankan untuk menertibkan pinjam pakai aset tetap berupa kendaraan bermotor milik Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah, sehingga dapat meminimalkan timbulnya potensi aset tetap yang hilang atau tidak ditemukan keberadaannya, termasuk menertibkan penggunaan rumah dinas sehingga jelas penghuninya dan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya.

Sementara itu, temuan kekurangan volume fisik atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis pada beberapa pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa pada beberapa SOPD menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10,12 miliar dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp7,15 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp2,97 miliar,

BPK mengharapkan dapat disetorkan ke Kas Daerah pada saat pemantauan tindak lanjut nanti.

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Telp: (0536) 3241118
Email: palangkaraya@bpk.go.id